I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan dari terbentuknya pemerintahan Desa adalah keberanekaragamnya masyarakat yang terdapat dalam Desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem politik desa dalam mewujudkan otonomi desa dengan memberdayakan masyarakat.

Peranan Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, demi mewujudkan otonomi Desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri baik dalam bidang politik (pemilihan Kepala Desa) dan pemerintahan (pelayanan publik).

Desa dengan sistem pemilihan kepala desanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses demokratisasi di tingkat masyarakat lokal. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk dari pembangunan demokrasi politik Bangsa Indonesia yang dimulai di tingkat lokal. Pemilihan Kepala Desa, merupakan suatu pemilihan secara langsung oleh masyarakat atau warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan merupakan jabatan karir, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa melalui pemilihan.

Masyarakat Desa diberikan kesempatan menggunakan hak politiknya pada pemilihan kepala desa melalui statusnya sebagai pemilih yang mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, pemilih diartikan sebagai warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum/kepala daerah/kepala desa didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum/kepala daerah/kepala desa.

Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih, yaitu usia 17 tahun atau yang sudah/pernah menikah. Pemilih pemula dengan rentang usia 17 tahun hingga 21 tahun masih awam dalam dunia politik, karena mereka baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan sebelumnya belum bisa menggunakan hak pilihnya karena ketentuan Undang-Undang. Karakteristik yang dimiliki oleh

pemilih pemula tentu berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya.

Pemilih pemula tentu belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS, belum memiliki pengalaman memilih, memiliki antusias yang tinggi, dan kurang rasional. Kemudian, pemilih pemula masih penuh gejolak dan semangat yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar, serta memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu meskipun kadang dengan bebagai latar belakang yang berbeda.

Setidaknya terdapat empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam setiap Pemilihan Umum yaitu:

1. Alasan kuantitatif, bahwa pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap pemilihan umum.
2. Pemilih pemula merupakan satu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur atau diprediksi.
3. Kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan karena banyaknya pilihan partai politik yang muncul yang akhirnya menjadikan mereka tidak memilih sama sekali.

4. Masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi pemilih pemula.

Pemilih pemula biasanya menentukan pilihan politik mengikuti apa yang menjadi pilihan *peergroup*nya atau kelompok teman sebaya mereka. Selain faktor tren politik dan pilihan *peergroup,* pemilih pemula biasanya menggunakan hak pilih juga karena mengikuti pilihan orang tua mereka. Namun bagi sebagian pemilih pemula yang sudah faham dunia politik, memiliki segmentasi tersendiri, sehingga tidak jarang mereka menentukan pilihan yang sesuai dengan jiwa muda mereka.

Pemilihan kepala desa telah ada jauh sebelum era pemilihan kepala daerah (Pilkada) Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan dilakukannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pemilihan Kepala Desa secara serentak juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada periode januari-april 2013, dimana terdapat 193 desa atau yang biasa disebut pekon menggelar pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala pekon serempak pada periode tersebut. Pekon Banyu Urip merupakan salah satu pekon di wilayah Kabupaten Tanggamus yang telah melaksanakan pemilihan kepala pekon pada periode serentak tersebut, lebih tepatnya pada tanggal 11 maret 2013.

Pada pemilihan kepala Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun 2013, jumlah pemilih pemula mencapai lebih dari 10 % dari keseluruhan jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Adapun rincian jumlah pemilih pemula pada pemilihan kepala Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pemilih Pemula

No	Dusun	Jumlah
1.	I	34 orang
2.	II	27 orang
3.	III	19 orang
		80 orang

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2013.

Perilaku memilih pemilih pemula pada pemilihan Kepala Pekon Banyu Urip tahun 2013 tentunya tidak terlepas dari adanya kelompok-kelompok sosial di sekitarnya. Kelompok-kelompok sosial tersebut terdiri dari kelompok formal seperti organisasi dan perkumpulan dan kelompok informal yang didalamnya termasuk kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang terdekat dengan intensitas komunikasi yang rutin seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman sepermainan *(peergroup)*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai perilaku memilih pemilih pemula pada pemilihan Kepala Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun 2013 dalam pendekatan sosiologis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah perilaku memilih pemilih pemula pada pemilihan Kepala Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun 2013 dalam pendekatan sosiologis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perilaku memilih pemilih pemula pada pemilihan Kepala Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun 2013 dalam pendekatan sosiologis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

   Hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian berkaitan dengan konsep perilaku pemilih yang memberikan penelaahan secara teoritik mengenai perilaku pemilih khususnya perilaku pemilih pemula pada era demokrasi.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aktor politik, pemerintah, partai politik dan masyarakat luas dalam memahami dan mengkaji serta menggunakan perilaku memilihnya pada proporsi yang seharusnya pada setiap momen politik suksesi di era demokrasi. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menciptakan pemilihan seorang pemimpin baik di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih tinggi yang bermutu baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam memaksimalkan fungsi pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat khususnya para generasi muda.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perilaku pemilih pernah dilakukan oleh Gito Ariebowo pada tahun 2011 dengan judul "Perilaku Pemilih Masyarakat Minang Imopuro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Metro 2010". Penelitian tersebut melihat bagaimana perilaku masyarakat etnis minang di Kelurahan Imopuro Kota Metro dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2010 lalu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh faktor-faktor etnis yang melatarbelakangi dan membentuk perilaku memilih masyarakat minang dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Metro tahun 2010 lalu. Terdapat beberapa teori dan tinjauan pustaka yang diambil dari penelitian tersebut yang kemudian dipakai dalam penelitian ini khususnya teori mengenai pendekatan sosiologis perilaku pemilih. Teori mengenai pendekatan sosiologis tersebut dianggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.